

kabupaten. Berkaitan dengan peraturan baru dan revisi tentang keseimbangan fiskal, ada isu bahwa administrasi daerah akan diizinkan untuk meminjam dana secara lokal atau dari luar negeri, tapi pinjaman asing akan diperoleh setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, yakni dari Departemen Keuangan. Ini seperti isu yang Greg telah gambarkan - bahwa pemerintahan daerah perlu menerima persetujuan dari pemerintah pusat. Namun demikian, saya kira jika pejabat pemerintah daerah mampu melaksanakannya dan memberikan proposal yang baik, mudah-mudahan pemerintah pusat akan menyetujuinya. Dan hal penting lainnya adalah bahwa propinsi akan diizinkan untuk mengeluarkan surat utang sebelum mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah dan dari Departemen Keuangan. Tapi ini harus dilakukan berdasarkan peraturan pasar modal yang ada dan tidak akan ada jaminan untuk surat hutang tersebut dari pemerintah pusat, meskipun pemerintah dapat mengatakan bahwa mereka akan memilih peringkat agensi-agensi untuk mengevaluasi resiko dari masing-masing daerah yang merencanakan untuk mengeluarkan surat hutang. Yang ingin saya di sini adalah bahwa ada peluang yang akan muncul di sini. Saya belum membaca peraturan tersebut, karena peraturan tersebut belum diedarkan, tapi ini adalah hal-hal penting yang saya telah lihat di media.

**Moderator:** Ya, anda telah mengemukakan banyak usulan penting di sini, namun saran yang terakhir, saya kira adalah yang paling inovatif. Saya kira ini benar-benar baru dan belum sepenuhnya diukur, karena kebijakan surat utang baru disetujui oleh pemerintah. Baiklah sekarang giliran Dr. Culpeper.

**Culpepper:** Terima kasih saya akan membuat beberapa komentar tentang apa yang departemen-departemen dan badan-badan lain selain CIDA mungkin dapat lakukan karena saya kira hal itu sangat penting bagi ekonomi pasar yang baru muncul seperti Indonesia dimana hubungan kita secara jauh lebih luas didasarkan dari pada hanya melalui CIDA. Selama sesi pagi saya menjelaskan penghentian perjanjian-perjanjian multi-fiber (MFA) dan dampaknya pada Indonesia. Sebenarnya, banyak negara-negara lain yang juga sedang melakukan penghentian MFA tersebut. Bangladesh adalah salah satunya. Karena itu pada kesempatan ini saya akan mengatakan bahwa kami meminta bantuan dukungan dari ITC, *International Trade Canada*, agar lebih sensitive pada isu ini dan membawanya ke WTO sebagai sebuah isu pembangunan. Masalah yang para pejabat kami